



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSINDIANING WIJIARTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 507863

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 188.600.000

1. MOTOR, KYMCO SG20 AB / SEPEDA MOTOR Tahun 2002,
HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000
2. MOTOR, HONDA CBR250RAB MT / SEPEDA MOTOR Tahun
2011, HASIL SENDIRI Rp. 15.800.000
3. MOTOR, HONDA GL15B1DF MT / SEPEDA MOTOR Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC SH4 AT / SEDAN Tahun 1988, HASIL
SENDIRI Rp. 27.500.000
5. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 AT /SEPEDA MOTOR Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
6. MOTOR, KAWASAKI LX150H / SEPEDA MOTOR Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV (4X2) A/T Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.600.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 59.228.857

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 661.428.857

**III. HUTANG**

Rp. 99.065.517

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 562.363.340

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.